



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Motang Rua No. 1 Ruteng

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**  
**NOMOR : ORGAN.065/483.a/XII/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**  
**NOMOR : ORGAN.065/88.a/VII/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SEKRETARIAT KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN 2016 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,**

- Menimbang : a. bahwa berhubung adanya perubahan pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai, maka Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : Organ.065/88.a/VII/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : Organ.065/88.a/VII/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 26a Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 52 Tahun 2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 26a Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016

Nomor 38);

11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR: ORGAN.065/483.a / XII/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR : ORGAN.065/88.a/VII/2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016 - 2021.

**Pasal I :** Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Nomor : Organ.065/88.a/VII/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021, diubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Nomor : Organ.065/88.a/VII/2016, diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
- b. Ketentuan lain dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Nomor : Organ.065/88.a/VII/2016, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

**Pasal II :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 27 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**



**MANSELTUS MITAK, SH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19590323 198693 1 017**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016-2021**

**VISI** : *Terdepan dalam Pemberian Pelayanan Prima kepada Masyarakat Manggarai dan Aparatur Pemerintahan.*

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN / ALASAN	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA	VALIDATOR	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Misi 1</b>	<b>Melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel dan Transparan</b>						
1	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM dan Pembenahan Sub Sistem Hukum Daerah	1.1	Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	$\frac{\text{Jlh Kasus bantuan hukum yang diselesaikan}}{\text{Jlh Kasus yang ada}} \times 100$	Untuk mengetahui Kasus hukum yang tertangani	Sekretaris Daerah Kabag. Hukum	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		1.2	Jumlah desa sadar hukum	Jumlah Desa Sadar Hukum thn pengukuran	Untuk mengetahui jumlah Desa Sadar Hukum	Sekretaris Daerah Kabag. Hukum	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		1.3	Jumlah produk hukum yang ditetapkan : 1 Peraturan Daerah 2 Peraturan Bupati 3 Keputusan Bupati 4 Instruksi Bupati	Jumlah produk hukum yang ditetapkan thn pengukuran	Untuk mengetahui jumlah produk hukum yang ditetapkan	Sekretaris Daerah Kabag. Hukum	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Kinerja Pemda	2.1	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja	$\frac{\text{Jlh PD yang menyusun laporan kinerja}}{\text{Jlh PD yang wajib menyusun laporan kinerja}} \times 100$	Untuk mengetahui jumlah PD yang menyusun laporan kinerja	Sekretaris Daerah Kabag. Organisasi	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		2.2	Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP PD sampel	Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP PD sampel thn pengukuran	Untuk mengetahui rata-rata nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah Kabag. Organisasi	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		2.3	Persentase Perangkat Daerah menyusun LKPj dan LPPD	$\frac{\text{Jlh PD yang menyusun LKPj dan LPPD}}{\text{Jlh PD yang wajib menyusun LKPj dan LPPD}} \times 100$	Untuk mengetahui PD yang menyusun LKPj dan LPPD	Sekretaris Daerah Kabag. Adm. Pemerintahan	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		2.4	Persentase penataan wilayah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	$\frac{\text{Jlh wilayah yang ditata tahun ybs}}{\text{Jlh wilayah yang seharusnya ditata}} \times 100$	Untuk mengetahui jumlah wilayah yang ditata	Sekretaris Daerah Kabag. Adm. Pemerintahan	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		2.5	Jumlah kecamatan yang mengadministrasikan pembakuan nama rupa bumi Kab. Manggarai	Jml kecamatan yang mengadministrasikan pembakuan nama rupa bumi Kab. Manggarai thn pengukuran	Untuk mengetahui jumlah kecamatan yang telah melakukan pembakuan nama rupa bumi	Sekretaris Daerah Kabag. Adm. Pemerintahan	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		2.6	Persentase konflik masyarakat yang difasilitasi penyelesaiannya	$\frac{\text{Jlh kasus yang telah difasilitasi penyelesaiannya}}{\text{Jumlah kasus yang masuk}} \times 100$	Untuk mengetahui kasus atau konflik sosial kemasyarakatan yang telah difasilitasi penyelesaiannya	Sekretaris Daerah Kabag. Adm. Pemerintahan	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
3	Terwujudnya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Anjab, ABK dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	3.1	Persentase Perangkat Daerah yang Kelembagaannya telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	$\frac{\text{Jlh Perangkat Daerah yang Kelembagaannya telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku}}{\text{Jlh Perangkat Daerah}} \times 100$	Untuk mengetahui Perangkat Daerah yang Kelembagaannya telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sekretaris Daerah Kabag. Organisasi	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN / ALASAN	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA	VALIDATOR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Misi 2</b>	<b>Melaksanakan Administrasi Pembangunan yang Terpadu, Efektif dan Efisien untuk Kepentingan Masyarakat.</b>					
1	Terwujudnya pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan	1.1 Persentase proyek yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jlh proyek yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah proyek yang ada}} \times 100$	Untuk mengetahui jumlah proyek yang diselesaikan tepat waktu	Sekretaris Daerah Kabag. Adm. Pembangunan	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		1.2 Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan administrasi pembangunan dengan baik	$\frac{\text{Jlh PD yang melaksanakan adm. Pembangunan dengan baik}}{\text{Jlh PD}} \times 100$	Untuk mengetahui jumlah SKPD yang melaksanakan administrasi pembangunan dengan baik	Sekretaris Daerah Kabag. Adm. Pembangunan	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		1.3 Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat waktu	$\frac{\text{Jlh keg. pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat waktu}}{\text{Jlh sirh keg. pengadaan barang dan jasa}} \times 100$	Untuk mengetahui jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu	Sekretaris Daerah Kabag. Adm. Pembangunan	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
<b>Misi 3</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya dan Pengembangan Kelembagaan Organisasi Masyarakat Setempat.</b>					
1	Terwujudnya organisasi Pemuda yang partisipatif	1.1 Jumlah organisasi pemuda yang dibina	Jumlah organisasi pemuda yang dibina thn pengukuran	Untuk mengetahui jumlah organisasi pemuda yang dibina	Sekretaris Daerah Kabag. Adm. Kesos	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		1.2 Jumlah organisasi olahraga yang dibina	Jumlah organisasi olahraga yang dibina thn pengukuran	Untuk mengetahui jumlah organisasi olahraga yang dibina	Sekretaris Daerah Kabag. Adm. Kesos	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
<b>Misi 4</b>	<b>Pemberdayaan Daerah dengan Memanfaatkan Seluruh Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah untuk Menggerakkan Seluruh Potensi Pembangunan menjadi Kekuatan Nyata bagi Kesejahteraan Masyarakat.</b>					
1	Terwujudnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat penerima manfaat Raskin	1.1 Koordinasi pelaksanaan penyaluran raskin bagi RTSPM di 171 Desa / Kelurahan	Jumlah RTSPM thn pengukuran	Untuk mengetahui jumlah RTSPM Raskin	Sekretaris Daerah Kabag. Adm. Perekonomian	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		1.2 Jumlah pagu beras	Jumlah pagu beras thn pengukuran	Untuk mengetahui jumlah pagu beras yang diberikan kepada masyarakat	Sekretaris Daerah Kabag. Adm. Perekonomian	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2	Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa dalam rangka menekan laju inflasi	2.1 Cakupan wilayah pengawasan peredaran barang dan jasa	$\frac{\text{Jlh wil. Kec. yang dilakukan pengawasan}}{\text{Total wilayah Kec.}} \times 100$	Untuk mengetahui jumlah wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa	Sekretaris Daerah Kabag. Adm. Perekonomian	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		2.2 Laju Inflansi	Laju Inflansi thn pengukuran	Untuk mengetahui laju inflansi	Kabag. Adm. Perekonomian	
3	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	3.1 Cakupan upaya peningkatan kesehatan masyarakat	$\frac{\text{Realisasi keg. Peningkatan Kes. Masy.}}{\text{Target keg. Peningkatan Kes. Masy.}} \times 100$	Untuk mengetahui jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan pola hidup sehat	Sekretaris Daerah Kabag. Adm. Kesos	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		3.2 Jumlah rekomendasi pelayanan kesehatan yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan thn pengukuran	Untuk mengetahui jumlah rekomendasi yang telah diterbitkan untuk melayani masyarakat yang terlayani program JAMKESDA	Sekretaris Daerah Kabag. Adm. Kesos	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		3.3 Cakupan pelayanan bidang keagamaan	$\frac{\text{Realisasi keg. Pel. Bidang Keagamaan}}{\text{Target keg. Pel. Bidang Keagamaan}} \times 100$	Untuk mengetahui jumlah pelayanan bidang keagamaan yang difasilitasi	Sekretaris Daerah Kabag. Adm. Kesos	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4	Terwujudnya pelayanan bidang kemasyarakatan	4.1 Jumlah Dialog Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dengan Tokoh Masyarakat, tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat	Jlh Dialog Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dengan Tokoh Masyarakat, tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat thn pengukuran	Untuk mengetahui jumlah dialog Bupati dan Wakil Bupati dengan Tokoh Masyarakat, tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat	Sekretaris Daerah Kabag. Adm. Kesos Kabag. Humas dan Protokol Kabag. Umum	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN / ALASAN	PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA	VALIDATOR
1	2	3	4	5	6	7
		4.2 Jumlah aparat kehumasan dan keprotokolan yang mengikuti diklat	Jlh aparat kehumasan dan keprotokolan yang mengikuti diklat dalam rangka mendukung pelayanan bidang kemasyarakatan thn pengukuran	Untuk mengetahui jumlah aparat kehumasan dan keprotokolan yang mengikuti diklat dalam rangka mendukung pelayanan bidang kemasyarakatan	Sekretaris Daerah Kabag. Humas dan Protokol	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		4.3 Jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah - Media Massa - Media cetak dan media luar ruangan	Jlh media penyampaian informasi pembangunan daerah thn pengukuran	Untuk mengetahui jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah	Sekretaris Daerah Kabag. Humas dan Protokol	Kasubag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi

RUTENG, 27 DESEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH,

  
MANSELTUS MITAK, SH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19590323 198603 1 017